

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kepemilikan senjata nuklir oleh suatu negara memang menjadikan perubahan konteks politik internasional menjadi rawan konflik mengingat senjata tersebut memiliki nilai tawar kekuatan untuk menentukan suatu pemerintahan mempengaruhi yang lainnya, seperti Korea Utara yang ingin meluncurkan nuklirnya terhadap Korea Selatan. Isu bahwa Korea Utara memiliki senjata nuklir ditanggapi serius oleh negara-negara anggota PBB serta negara-negara Dewan Keamanan PBB dengan memberikan bantuan pinjaman uang serta dicabutnya sanksi-sanksi terhadap Korea Utara. Dengan kata lain bahwa nuklir dapat memunculkan permasalahan dan ketegangan baru diberbagai belahan dunia termasuk yang terjadi di kawasan Timur tengah yang sangat rawan konflik. seperti yang terjadi saat ini yang sangat menjadi kontroversi atas pro dan kontra kepemilikan fasilitas program nuklir Iran. Motivasi dan ambisi pemerintah Iran memiliki program nuklir didorong oleh dua aspek penting. Pertama, kepemilikan program nuklir dapat digunakan sebagai faktor deterrent dan penyeimbang realitas hubungan internasional kontemporer.

Kepemilikan teknologi nuklir bukan semata-mata hanya ditujukan untuk kebutuhan (energi) domestik semata tetapi lebih jauh dari itu, kepemilikan nuklir bagi Iran merupakan alat penting bagi politik luar negeri dalam interaksinya di sistem internasional. Selain itu, faktor deterrent ini juga menjadi alat utama kebijakan pertahanannya yang tertuang sebagai doktrin pertahanan dalam melindungi

kepentingan nasionalnya. Sementara itu, aspek kedua, yakni, peningkatan prestise internasional, mobilitas sosial dan "bargaining power", lebih ditujukan pada tingkat regional dimana Iran dikelilingi oleh negara-negara yang juga memiliki teknologi (persenjataan) nuklir seperti India dan Israel. Gambaran interaksi keamanan regional di Timur tengah yang dapat merugikan kepentingan keamanan nasional Iran. Sehingga Iran tidak memiliki pilihan lain selain berupaya untuk memiliki program nuklir, terutama disaat interaksi antar negara di Timur tengah sangat diwarnai oleh "Struggle of power", yang sangat menekankan aspek politik-militer.

Dalam konteks Motivasi dan ambisi politik-militer kebijakan luar negerinya, Iran memfokuskan penguasaan kemampuan teknologi (persenjataan) nuklirnya kedalam dua program utama. Pertama, program misil jelajah (cruise missile program) dengan jarak jangkauan yang bisa mencapai 2000-6000 km, dimana desain awalnya menggunakan teknologi yang berasal dari RRC, seperti silkworm anti-ship misil. Pengembangan misil jelajah ini dilaporkan bisa mencapai London. Kedua, program misil jarak pendek dengan jarak jangkauan 130-200 km yang merupakan pengembangan rudal Scud dari Rusia dan rudal No-Dong dari Korea Utara.

Motivasi dan kebijakan luar negeri Iran diatas untuk menguasai dan mengembangkan kemampuan teknologi (persenjataan) nuklir tentu saja akan memberikan konsekwensi penting terhadap stabilitas dan kawasan Timur tengah dan dunia internasional, khususnya negara-negara Barat tentang seberapa maju dan canggih program misil yang dimiliki Iran dan reaksi kemudian yang muncul dari komunitas internasional.

Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad menyatakan bahwa Iran berhasil mencapai target untuk mengaktifkan lebih dari 3.000, alat pengayaan uraniumnya. Dengan demikian, Iran berhasil menghadapi tantangan-tantangan dari Negara-negara superpower yang menentang program nuklir Iran. Setiap minggu Iran akan menginstal satu unit baru alat pengayaan uraniumnya. Iran akan menjadi negara yang memiliki nuklir tanpa harus membayar konsesi pada negara manapun. Kekuatan-kekuatan hegemoni mengira bahwa Iran akan mundur jika mereka memberikan sanksi terhadap negara ini, tapi Iran justru mengalami kemajuan dalam program nuklirnya setiap kali diberi sanksi.

Namun pada tanggal 13 April 2009 pemerintah Iran bersedia untuk melakukan perundingan program nuklir kontroversialnya dengan enam negara. Kesediaan Pemerintah Iran untuk melakukan perundingan dengan enam negara adidaya tersebut telah menimbulkan ketertarikan penulis untuk mengangkat judul **”Kesediaan Pemerintah Iran Dalam Perundingan Program Nuklirnya Dengan Enam Negara**

B. Latar Belakang Masalah.

Saat ini yang menjadi kontroversi adalah kesediaan pemerintah Iran kembali berunding tentang program nuklir Iran, setelah mengalami proses kebuntuan. Pada deklarasi Paris yang ditandatangani pada bulan februari 2004, Eropa telah berjanji untuk mengakui hak Iran dalam masalah nuklir. Eropa menjanjikan untuk mengupayakan pelaksanaan aturan yang tidak mendiskriminasikan hak Iran dalam menjalankan proyek nuklir Iran dalam kerangka perjanjian larangan pengembangan senjata nuklir. Namun Uni Eropa terkesan tidak serius dalam mengakui hak Iran

untuk mengayakan uranium dan mengingkari janji dalam perundingan kesepakatan Paris. Sehingga pada bulan September 2005 Iran menghentikan upaya perundingan tentang masalah fasilitas program nuklir Iran setelah deklarasi Paris mengalami jalan buntu. Pemerintah Iran kemudian kembali pada proyek pengayaan uranium nuklirnya dan tidak lagi membuka diri untuk melanjutkan perundingan.

Pemerintah Iran sendiri menganggap bahwa proliferasi program nuklirnya adalah hak intelektual sebuah negara untuk memperkaya kemampuan teknologi dibidang nuklir sesuai dengan hak asasi yang telah dilindungi. Keberhasilan pemerintah Iran mencapai target untuk mengaktifkan pengayaan uraniumnya menjadi kemajuan yang sangat pesat dalam pengembangan program nuklirnya.

Pemerintah Iran juga telah mengusir tim investigasi IAEA yang sebelum perundingan Paris telah berada di Iran untuk menyelidiki fasilitas program nuklir Iran di Bushehr untuk meneliti program nuklir Iran dan menyelidiki kecurigaan dunia internasional terhadap isu pengembangan senjata pemusnah massal yang selama ini menjadi alasan utama negara-negara nuklir untuk menghentikan program nuklir Iran.

Oleh karena sikap Iran yang tetap ingin mempunyai teknologi nuklir, maka AS dan sekutunya membujuk PBB untuk memberikan sanksi terhadap Iran. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akhirnya secara bulat menyetujui pemberian sanksi berat terhadap Iran. Semua negara anggota tetap dan tidak tetap DK PBB menyetujui resolusi baru 1737 (2006) bagi pemerintah Iran itu karena enggan menghentikan program nuklirnya. Namun pemerintah Iran tidak gentar dengan sanksi

yang telah dikeluarkan oleh PBB melalui sidang DK PBB. Iran tetap tak bergeming dan tetap melanjutkan menginstal tiap minggunya unit pengayaan uraniumnya.

Reaksi keras Amerika Serikat dan beberapa negara seperti Inggris, Perancis dan Jerman dalam 3 Uni Eropa tidak di gubris oleh pemerintah Iran yang telah merasa dikecewakan oleh Negara-negara maju yang selama ini hanya ingin menghentikan fasilitas program nuklir Iran.

Resolusi dari PBB ini menciptakan sebuah ketegangan antara Pemerintah Republik Islam Iran dengan Empat Negara yang diketuai oleh Amerika Serikat bersama German, Perancis, Inggris. Merasa tidak di taati oleh pemerintah Iran DK PBB kemudian kembali bersidang dan mengeluarkan Draft Resolusi baru yaitu Draft Resolusi 1747 (2007) yang berisi tentang 60 hari Iran harus segera menghentikan program nuklirnya. Namun Pemerintah Iran tidak gentar atas sanksi yang dijatuhkan kepadanya yakni resolusi DK PBB 1747. Resolusi DK PBB 1747 ini merupakan perluasan Resolusi 1737 yang dikeluarkan bulan Maret 2007 berisi agar dalam 60 hari Iran menghentikan program nuklirnya. Resolusi 1737 itu tidak dihiraukan Pemerintah Iran yang masih terus melanjutkan pengayaan uraniumnya sehingga DK PBB merasa perlu membuat tekanan lebih kuat.¹

Pada 13 April 2009, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Jerman telah memberikan mandat kepada Javier Solana (pimpinan kebijakan luar negeri Uni

¹ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0307/28/In/454673.htm>

Eropa) untuk mengundang Iran dalam diskusi masalah nuklir untuk mempertegas posisi Iran dalam menuntaskan masalah nuklirnya

Kemudian pada tanggal 13 April 2009 Pemerintah Iran akhirnya menyatakan siap berunding dengan enam Negara terkait dengan program nuklir kontroversialnya. Republik Islam Iran menyambut baik semua diskusi dengan kelompok Negara adidaya yang bisa menghasilkan kerjasama membangun.

C. Pokok Permasalahan

Masalah yang kemudian timbul dalam pokok permasalahan dari program nuklir Iran yaitu:

Mengapa pemerintah Republik Islam Iran kembali bersedia melakukan perundingan dengan enam negara yang membahas tentang kelanjutan dari program nuklir Iran?

D. Kerangka Dasar Pemikiran.

Kemudian untuk membantu dalam membahas acuan dasar pemikiran tentang kesediaan pemerintah Iran dalam perundingan program nuklirnya dengan enam negara, penulis menggunakan konsep/ teori tipologi Politik Luar Negeri yang dibuat oleh Jhon Lovell yaitu:²

² John lovell, Foreign Policy in Perspective (Holt, Rinchart, Winston, 1970), hal. 99

BAGAN 1.

Tipologi Strategi Politik Dalam Negeri

Penilaian terhadap strategi lawan

| | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | | mengancam | mendukung |
| Perkiraan kemampuan sendiri | Lebih kuat | konfrontasi | memimpin |
| | Lebih lemah | akomodasi | konkordan |

Sumber : John Lovell Foreign Policy In Perspective (Holt,Rinchart,Winston 1970)³

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa bila melihat perkiraan kemampuan sendiri yang lebih kuat dan kemudian melihat terhadap penilaian strategi lawan yang lebih lemah maka akan melahirkan sikap konfrontasi.

Sedangkan akomodasi, bila melihat perkiraan kemampuan sendiri yang lebih lemah terhadap strategi penilaian lawan yang lebih kuat dan mengancam maka akan melahirkan sikap akomodasi. Sedangkan bila melihat perkiraan kemampuan sendiri yang lebih kuat terhadap penilaian strategi lawan yang mendukung maka akan melahirkan sikap memimpin. dan sebaliknya juga dengan bila melihat perkiraan kemampuan sendiri yang lebih lemah terhadap penilaian strategi lawan yang lebih kuat dan memimpin maka akan melahirkan sikap konkordan.

³ ibid

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Melalui perkiraan kemampuan sendiri yang dimiliki oleh enam negara yang lebih kuat dan mengancam terhadap penilaian strategi lawan yang lebih lemah yaitu pemerintah Iran dalam hal ini akan melahirkan sikap konfrontatif dari enam negara.

Sedangkan bagi pemerintah Iran melihat kemampuan sendiri dari pemerintah Iran yang lebih lemah terhadap penilaian strategi dari enam negara yang lebih kuat dan mengancam maka akan melahirkan sikap akomodasi dari pemerintah Iran. Sikap ini diambil oleh pemerintah Iran dengan maksud bahwa pemerintah Iran melihat dari kekuatan dominasi dari enam negara yang begitu kuat serta dominan dalam segala hal baik dari hal persenjataan dan juga lobi internasional yang bisa jadi menjadi dampak kurang menguntungkan bagi pemerintah Iran.

E. Hipotesa

Pemerintah Iran bersedia berunding dengan enam Negara karena:

1. Kekuatan pemerintah Iran lebih lemah dibanding Enam Negara
2. Empat Negara (Amerika Serikat, Perancis, Inggris, dan German) mengancam pemerintah Iran

F. Tujuan Penulisan.

Penulisan skripsi berjudul "Kesediaan Pemerintah Iran Dalam Perundingan Program Nuklirnya Dengan Enam Negara." ini bertujuan untuk:

Membahas secara ilmiah mengenai program nuklir Iran yang menarik bagi semua yang menaruh minat terhadap studi Hubungan Internasional, terutama mengenai Kesiapan Pemerintah Iran melakukan perundingan dengan Enam Negara yang membahas program nuklirnya, apakah akan terjadi sebuah kesepakatan yang nyata untuk mencari solusi atas program nuklir Iran. dan Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian strata -1 (-1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan menerapkan pola-pola pengolahan data yang diperoleh dari berbagai literatur, buku, jurnal, laporan media massa, serta sumber-sumber yang relevan lainnya termasuk data yang diperoleh dari berbagai website yang terkait dengan permasalahan yang diuraikan dalam penulisan skripsi ini.

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena dengan menggunakan teori-teori atau konsep yang dianggap tepat, sehingga didapat analisa yang akurat atas permasalahan yang ada.

H. Jangkauan penelitian.

Untuk memudahkan penulis di dalam bahan analisis, maka penelitian ini memerlukan batasan. Penelitian ini memfokuskan pada tahun 2000 sampai tahun 2009 yang akhir-akhir ini kembali menjadi perbincangan di kalangan internasional.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas permasalahan permasalahan yang akan dibahas, perlu adanya uraian sistematika penulisan untuk memudahkan menelusuri akar pemikiran dan analisa penulis. Penulisan ini dibagi kedalam lima bab yaitu sebagai berikut:

- BAB I** Merupakan bab pendahuluan yang berisikan aturan-aturan baku penulisan ilmiah, yang terdiri dari: Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** Berisikan mengenai profil nuklir Iran, pada sub ini akan dijelaskan keadaan geografis Iran, perekonomian Iran, politik militer Iran, sejarah nuklir Iran, dan sistem pertahanan dan keamanan Iran
- BAB III** Berisikan kesediaan pemerintah Iran kembali berunding dengan enam negara, pemerintah Iran menerapkan kepercayaan terhadap Enam Negara perundingan dengan 3UE, hasil perundingan dengan 3UE, pemerintah Iran bersedia mengakomodasi keinginan Enam Negara
- BAB IV** Berisikan tentang perimbangan kekuatan Iran-Enam Negara, ancaman 3 UE (Jerman, Inggris dan Perancis) terhadap pemerintah Iran mengenai program nuklir Iran, ancaman 3 UE (Jerman, Inggris dan Perancis) terhadap pemerintah Iran mengenai program nuklir Iran, ancaman pemerintah Amerika Serikat terhadap pemerintah Iran mengenai program

nuklir Iran,. Sanksi PBB dalam Draft Resolusi 1737 dan Draft Resolusi
1747

BAB V Berisikan kesimpulan dari seluruh hal-hal yang dikemukakan pada bab-
bab sebelumnya